

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andrea, Fockema. 1983. Kamus Hukum Terjemahan. Bandung: Bina Cipta.
- Anggiani, Jun. 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Apeldoorn, Van. 1990. Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Oetari Sadino). Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arba, H.M. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- _____. 2011. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachsan, Mustofa. 1988. Hukum Agraria dalam Perspektif. Bandung: Remadja Karya.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Parangin. 1989. Hukum Agraria Indonesia: Telaah dari Sudut Pandang Praktisi. Jakarta: Rajawali.
- Fauzan, H.M. 2013. Peranan PERMA dan SEMA dalam Mengisi Kekosongan Hukum Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2018. Hukum Pengadaan Tanah: Aspek Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- _____. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, Boedi. 2006. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.

- _____. 2008. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA 1960, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huijbers, Theo. 1982. Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismail, Nur Hasan. 2006. Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Irwansyah & Yunus, Ahsan. 2021. Penelitian Hukum: Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Margono. 2020. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2015. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. 1985. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Bina Cipta.
- Muladi. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Murhaini, Suriansyah. 2021. Hukum Pertanahan: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2010. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliandri. 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.
Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

3. Internet:

Badan Informasi Geospasial. 2022. Berapa Luas Negara Indonesia. <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/01/170000370/berapa-luas-negara-indonesia>. (Diakses pada 1 November 2022).
Bisnis.com. 2022. Menteri ATR/BPN Ungkap Lima Oknum Pejabat Mafia Tanah, <https://www.bisnis.com> (Diakses pada 1 Desember 2022).
Detik.com. 2023. Mafia Tanah Merajalela: Ini Peluang dan Cara Memberantasnya, <https://www.detik.com/edu/edu/detikpedia/d-5823494/mafia-tanah-merajalela-ini-peluang-dan-cara-memberantasnya-dari-pakar-ugm> (Diakses pada 27 Juli 2023).
Hukumonline. 2023. Mengenal Modus Permainan Mafia Tanah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-modus-permainan-mafia-tanah>. (Diakses pada 13 November 2023).
Kompas.com. 2022. Soal Dampak Mafia Tanah, Hadi Tjahjanto: Investor Bisa Cabut, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/16/174806521/soal-dampak-mafia-tanah-hadi-tjahjanto-investor-bisa-cabut> (Diakses pada 1 Desember 2022).
Konsorsium Pembaruan Agraria. 2024. Mengurai Konflik Agraria, Memerdekakan Rakyat Indonesia. <https://www.kpa.or.id/2024/01/20/mengurai-konflik-agraria-memerdekakan-rakyat-indonesia>. (Diakses pada 2 September 2024).
Konsorsium Pembaruan Agraria & Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development. 2024. Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia.

<https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia>. (Diakses pada 2 Desember 2024).

KBBI Daring. Definisi Hak Milik.

<https://kbbi.lektur.id/hak-milik> (Diakses pada 13 Oktober 2023).

KBBI Daring. Definisi Penguasaan.

<https://kbbi.lektur.id/penguasaan> (Diakses pada 13 Oktober 2023).

Liputan6.com. 2023. Mafia adalah Perkumpulan Rahasia dalam Tindak Kejahatan.

<https://www.liputan6.com/hot/read/mafia-adalah-perkumpulan-rahasia-dalam-tindak-kejahatan> (Diakses pada 12 Oktober 2023).

Wikipedia. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia (Diakses pada 8 Maret 2025).

DetikNews. 2023. Kejaksaan Pastikan SE Pedoman Penanganan Perkara Pertanahan Masih Berlaku.

<https://news.detik.com/berita/d-7424283/kejakung-pastikan-se-pedoman-penanganan-perkara-pertanahan-masih-berlaku> (Diakses pada 27 Juli 2023).